SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

Penguatan Akuntabilitas Keuangan Daerah: Pendampingan *Entry* Jurnal Penyesuaian melalui SIPD pada SKPD Kabupaten Sampang

Ririn Uswati[1*], Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda[2]
[1,2] Universitas Trunojoyo Madura

**Korespondensi*
E-mail: ririnuswati03@gmail.com

Dikirim: 28 Oktober 2025	Direvisi: 27 November 2025	Diterima: 14 Januari 2026

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pendampingan dan *entry* jurnal penyesuaian melalui SIPD pada SKPD Kabupaten Sampang Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan SIPD dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan agar lebih efektif, akurat dan tepat waktu sebagai wujud penguatan akuntabilitas keuangan daerah. Penyajian artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sampang. Kegiatan pendampingan ini diikuti oleh 40 orang akuntan pemerintahan yang berasal dari berbagai SKPD Kabupaten Sampang. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi akuntan pemerintahan pada setiap SKPD untuk meningkatkan pemahaman dalam melakukan *entry* jurnal penyesuaian, sekaligus memperkuat kolaborasi antar SKPD melalui forum tanya jawab yang interaktif. Adanya kegiatan ini juga memberikan pemahaman terkait jurnal yang perlu disesuaikan. Kendala yang muncul selama pendampingan dapat diatasi, sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Para peserta juga berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan setiap tahun untuk mempercepat proses penyusunan laporan keuangan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Keuangan Daerah, Pendampingan, SIPD

Abstract

This article aims to explain the implementation of mentoring and adjustment journal entries through SIPD at the Sampang Regency SKPD. It is hoped that this activity will optimise the use of SIPD in the financial recording and reporting process to be more effective, accurate and timely as a form of strengthening regional financial accountability. This article uses a qualitative descriptive method. This activity was held in the Hall of the Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) of Sampang Regency. This mentoring activity was attended by 40 government accountants from various SKPDs in Sampang Regency. This activity provided an opportunity for government accountants in each SKPD to improve their understanding of making adjustment journal entries, while also strengthening collaboration between SKPDs through an interactive question and answer forum. This activity also provided an understanding of the journals that need to be adjusted. The obstacles that arose during the assistance were overcome, so that the activity could run smoothly. Participants also expressed hope that similar activities could be conducted annually to expedite the financial reporting process.

Key Words: *Accountability, Regional Finance, Mentoring, SIPD*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung hal tersebut adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu Permendagri No. 70 Tahun 2019. SIPD dirancang untuk menyatukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah dalam satu sistem yang terintegrasi. Informasi yang tersedia dan mudah dipahami dapat dimanfaatkan sebagai alat pemantauan dan penilaian kinerja pemerintah (Hardiansyah & Jaffisa, 2024). Dengan adanya SIPD, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola keuangan berbasis teknologi informasi agar dapat memenuhi standar pelaporan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan aplikasi melalui web ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik pemerintahan di Indonesia. Namun perjalanan mengaplikasikan program ini tidaklah mudah, dibutuhkan kerjasama dan komitmen dari setiap instansi yang terlibat (Adisi & Sadad, 2022).

Kegiatan pengabdian terkait penggunaan SIPD telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Seperti Andriani et al (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan, namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan(Aklap), menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. Hamb atan penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Raja Ampat antara lain pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal dan teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan realisasi anggaran dimana menunya belum tersedia, sehinga laporanya belum balance dan pengembalian LS Kas Umum belum sesuai. Strategi dalam mengatasi hambatannya menggunakan strategi SO (*Strenght-Opprtunity*), SC(*Strenght-Culture*) dan AgC (*-Agility Culture*).

SIPD masih dalam tahap percobaan implemantasi di beberapa wilayah. Hal tersebut menyebabkan ketidakstabilan dan kurangnya integrasi dengan sistem manajemen keuangan lainnya. Hal ini menciptakan inefisiensi dalam manajemen data dan pelaporan keuangan (Romadhon & Nawawi, 2024). Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami teknis pengoperasian SIPD, kestabilan sistem yang masih sering mengalami gangguan, serta kurangnya sinkronisasi data antar modul dalam aplikasi. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam proses input data, kesalahan pencatatan, hingga potensi ketidaksesuaian laporan keuangan daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, belum optimalnya pendampingan teknis dari pemerintah pusat juga menjadi hambatan dalam akselerasi penggunaan SIPD secara merata di seluruh daerah.

Penerapan SIPD semakin dimaksimalkan melalui kegiatan pendampingan dan *entry* bersama jurnal penyesuaian oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Sampang. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas aparatur

pengelola keuangan daerah agar mampu memahami serta mengimplementasikan jurnal penyesuaian dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual, . Salah satu tahapan penting dalam siklus akuntansi pemerintahan daerah adalah penyusunan jurnal penyesuaian, yang berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat telah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya pada akhir periode. Tanpa jurnal penyesuaian yang tepat, laporan keuangan berisiko tidak mencerminkan realitas fiskal yang akurat. Karna jurnal penyesuaian memiliki peran strategis dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, pemahaman dan ketepatan dalam melakukan pencatatan jurnal penyesuaian menjadi hal krusial bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pemilihan Pemkab Sampang sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan PkM didasarkan pada pertimbangan objektif dan strategis. Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah di wilayah Madura yang tengah berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan, baik dalam aspek administrasi keuangan, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Kegiatan pendampingan ini menjadi wujud kolaborasi antara tim teknis SIPD dan para pengelola keuangan SKPD dalam mempercepat proses penyesuaian dan validasi data keuangan akhir tahun. Dengan metode pendampingan langsung, setiap SKPD dapat melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap transaksi yang belum sesuai. Langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan kompetensi aparatur, tetapi juga memperkuat proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan implementasi SIPD, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

METODE

Artikel pengabdian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Hal ini bertujuan untuk mengggambarkan secara sistematis proses pelaksanaan, dinamika kegiatan, serta hadil pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk memahami dan menyajikan fenomena sosial, khususnya terkait respons, partisipasi, dan perubahan pemahaman mitra sasaran selama kegiatan berlangsung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi kegiatan (foto, catatan, serta laporan pelaksanaan). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan deskripsi yang komprehensif mengenai pelaksanaan dan capaian program pengabdian. Selain itu, dapat memberikan gambaran utuh mengenai kontribusi kegiatan pengabdian terhadap optimalisasi pengetahuan, keterampilan, dan sumder daya manusia.

Pendampingan dan *entry* bersama jurnal penyesuaian yang dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sampang, yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk memberikan pemahaman serta dapat melakukan koreksi terhadap transaksi yang belum selesai untuk

jurnal penyesuaian di akhir pelaporan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2025, dan bertempat di Aula BPPKAD Kab. Sampang. Peserta kegiatan adalah seluruh petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Kab. Sampang. Selain itu, kegiatan ini diselenggarakan oleh bidang Akuntansi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. Alur metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tersaji pada gambar 1. Kegiatan ini ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu dengan 1) tahap persiapan kegiatan yakni bagian akuntansi BPPKAD menyampaikan undangan secara resmi yang dikirim melalui aplikasi Srikandi ke seluruh SKPD Kabupaten Sampang. 2) Tahapan selanjutnya pelaksanaan kegiatan *Entry* Jurnal Penyesuaian di Aula Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diikuti oleh 42 SKPD kabupaten Sampang. 3) Tahapan trakhir yaitu evaluasi kegiatan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui wawancara dengan peserta kegiatan.



Gambar 1. Alur Tahapan Metode Pelaksanaan Kegiatan

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Entry* Jurnal Bersama ini dilaksanakan di Aula Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang pada hari jumat, 07 Februari 2025. Pelaksanaan ini diadakan oleh bagian akuntansi untuk menyesuaikan pelapolan di akhir tahun. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023, setiap SKPD dapat menunjuk bagian akuntansi untuk mengelola data keuangan secara elektronik. Kegiatan pendampingan ini melibatkan pelatihan dan bimbingan teknis kepada bagian akuntansi di setiap SKPD, serta sesi entri bersama untuk memastikan keseragaman dalam pencatatan jurnal penyesuaian.

Tabel 1. Daftar SKPD yang mengikuti *Entry* Jurnal Bersama

No.	Daftar SKPD yang Hadir dalam Enrty Jurnal Bersama
1.	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
8.	Dinas Komunikasi dan informatika
9.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
10.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.	Dinas Pendidikan
17.	Dinas Perhubungan
18.	Dinas Perikanan
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22.	Dinas Tenaga Kerja
23.	Inspektorat Daerah
24.	Kecamatan Banyuates
25.	Kecamatan Camplong
26.	Kecamatan Jrengik
27.	Kecamatan Karang Penang
28.	Kecamatan Kedungdung
29.	Kecamatan Ketapang
30.	Kecamatan Omben
31.	Kecamatan Pangarengan
32.	Kecamatan Robatal
33.	Kecamatan Sampang
34.	Kecamatan Sokobanah
35.	Kecamatan Sreseh
36.	Kecamatan Tambelengan
37.	Kecamatan Torjun
38.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
39.	Sekretariat Daerah
40.	Sekretariat DPRD

Sumber: Data diolah, 2025

Table 1. menunjukkan bahwasannya pelatihan ini dilaksanakan dalam beberapa sesi dengan melibatkan bagian akuntansi dari masing-masing SKPD. Para peserta mendapatkan pendampingan teknis dari tim ahli yang memahami penggunaan SIPD dalam pelaporan, khususnya modul akuntansi dan pelaporan. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman terkait klasifikasi akun, metode pencatatan, dan jenis penyesuaian yang diperlukan. Proses dilakukan secara langsung melalui aplikasi SIPD, sehingga dapat

dipantau dan diperbaiki secara real-time apabila terjadi kesalahan input. kegiatan ini juga memperkuat koordinasi lintas SKPD serta meningkatkan kompetensi teknis para bagian akuntansi di masing-masing SKPD. Tahapan pertama dalam kegiatan ini yaitu semua bagian akuntansi dari SKPD dapat mengakses SIPD di website https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan lalu setelah konsolidator Akuntansi BPPKAD Kab. Sampang memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk menyusun jurnal penyesuaian yang perlu disesuaikan dalam SIPD.

Untuk tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan *Entry* Jurnal yaitu Setiap SKPD melakukan identifikasi terhadap akun-akun yang memerlukan penyesuaian pada akhir periode. Ini termasuk akun-akun seperti pendapatan yang belum diterima, biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum dicatat, aset yang telah mengalami penyusutan, dan kewajiban yang telah jatuh tempo. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, setiap SKPD membuat jurnal penyesuaian untuk setiap akun yang memerlukan penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini berisi debit dan kredit yang sesuai dengan jenis penyesuaian yang dilakukan. Kegiatan ini juga memberikan sesi tanya jawab pada saat pelaksaan.




Gambar 2. Pelaksanaan serta Pemdampingan *Entry* Jurnal Bersama

Pelaksanaan *entry* jurnal ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan seperti yang terdapat pada gambar 2. Kegiatan pembukaan dan sambutan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Akuntansi BPPKAD lalu dilanjut dengan pelaksanaan. Kegiatan dilakukan dan memberikan kesempatan bagi para peserta (petugas akuntansi) di setiap SKPD memahami dalam meng*entry* jurnal penyesuaian ini. Kolaborasi antar SKPD juga tercipta karena adanya forum tanya jawab yang interaktif. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas dan konsistensi data jurnal penyesuaian antar SKPD. Beberapa SKPD yang sebelumnya kesulitan dalam menyesuaikan transaksi-transaksi akhir tahun, kini mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri dengan lebih tepat waktu. Selain itu, adanya *entry* bersama juga meminimalkan kesalahan yang kerap terjadi akibat kurangnya pemahaman atau kelalaian teknis.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui wawancara dengan peserta kegiatan. Berikut uraian secara detail:

Tabel 2. Evaluasi Capaian Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Uraian
1	Kegiatan pendampingan teknis dari tim ahli terkait penggunaan SIPD dalam pelaporan, khususnya entry jurnal penyesuaian mudah dipahami. - Sangat setuju (87,5%) - Setuju (7,5%) - Cukup Setuju (5%) - Kurang Setuju (0%)
2	Dampak implementasi entry jurnal penyesuaian menggunakan SIPD memberikan berbagai manfaat signifikan bagi Kabupaten Sampang: - Meningkatkan akurasi dan konsistensi data keuangan meningkatkan akurasi dan konsistensi data keuangan - Mempercepat proses pelaporan keuangan - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah - Memudahkan proses audit dan pengawasan keuangan
3	Kendala yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan: - Koneksi internet yang kurang memadai - Tidak semua peserta dapat mengakses aplikasi SIPD karena sistem eror dan terdapat peserta kegiatan yang masih belum sepenuhnya memahami penggunaan SIPD - Rendahnya ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai di seluruh SKPD
4	Strategi menghadapi kendala selama kegiatan berlangsung: - Pemanfaatan jaringan alternatif, seperti hotspot pribadi atau wifi di lokasi terdekat yang memiliki koneksi lebih baik. - Bagi peserta kegiatan yang masih belum sepenuhnya memahami penggunaan SIPD, selanjutnya tetap didampingi oleh tim dari BPPKAD sampai aplikasi SIPD tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. - Perlu adanya peningkatan infrastruktur teknologi informasi yang memadai di seluruh SKPD

Sumber: Data diolah, 2025

SIMPULAN

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan pendampingan dan *entry* jurnal penyesuaian melalui SIPD pada SKPD Kabupaten Sampang Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan SIPD dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan agar lebih efektif, akurat dan tepat waktu sebagai wujud penguatan akuntabilitas keuangan daerah. Penyajian artikel ini menggunakan metode deskriptif

kualitatif. Pelaksanaan kegiatan entry jurnal ini berjalan baik dan lancar. Kegiatan Entry bersama jurnal penyesuaian seluruh SKPD Kabupaten Sampang menggunakan SIPD merupakan langkah penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Integrasi data keuangan melalui SIPD memastikan akurasi dan konsistensi data, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Keberhasilan implementasi ini bergantung pada komitmen seluruh pihak terkait, termasuk pelatihan yang memadai, infrastruktur yang mendukung, dan pengawasan yang efektif. Ke depannya, perlu dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi sistem ini, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan regulasi yang berlaku. Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi *entry* bersama jurnal penyesuaian menggunakan SIPD juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah pemahaman dan penguasaan sistem SIPD oleh seluruh petugas di SKPD. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan dan pendampingan yang intensif kepada petugas. Tantangan lainnya adalah ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai di seluruh SKPD. Solusi untuk tantangan ini adalah peningkatan infrastruktur IT dan memastikan konektivitas internet yang stabil.

Kegiatan pendampingan SIPD telah terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Capaian utama program meliputi meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah daerah dalam penggunaan modul SIPD, khususnya pada tahapan entry jurnal penyesuaian. Dampak nyata kegiatan pengabdian ini, tergambar melalui peningkatan keterampilan teknis aparatur dalam mengoperasikan SIPD serta berkurangnya kesalahan input data. Proses pengelolaan perencanaan dan penganggaran menjadi lebih tertib, terintegrasi, dan transparan. Pengabdian selanjutnya direkomendasikan untuk difokuskan pada pendampingan berkelanjutan, khususnya pada modul SIPD yang lebih kompleks seperti penatausahaan dan pelaporan.

PENGAKUAN/*ACKNOWLEDGEMENTS*

Penulis menyampaikan terimakasih kepada BPPKAD Kab. Sampang bagian akuntansi yang telah memberi pengalaman serta kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru dan tentunya memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, serta semua pihak yang telah turut membantu sehingga kegiatan ini dapat ebrjalan dengan baik. Kedepannya semoga kegiatan ini terus berkelanjutan.

REFERENSI

Andriani, Y., Umrah, St., & Husen, M. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada BPKAD Bidang Anggaran Kabupaten Raja Ampat. Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat, 3(1), https://doi.org/10.47945/al-khidmah.v3i1.1460

Arief, A. F., & Hayati, R. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dilihat Dari Aspek Struktur Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisinis*, *4*(2), 732–749.

BPK. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Chinda Aqhni Adisi, & Abdul Sadad. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *1*(3), 150–164. https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.581

Hardiansyah, R., & Jaffisa, T. (2024). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Transparan (Studi Kasus Pada Kantor Badan. *Innovative: Journal Of Social Science*, *4*, 5194–5206. Retrieved from http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13709%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/13709/9113

Imam, I. A. F., Novita, R., Ningsih, R. A., Fiernanda, V., Sari, S. S., & Usmaniyah, W. (2023). Aktivitas Pengisian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekterariat Daerah Kabupaten Sumenep. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(4), 545–552. https://doi.org/10.59395/altifani.v3i4.448

Manasikana, A., & Listiadi, A. (2017). Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Berbasis Android Pada Materi Jurnal Penyesuaian Dan Jurnal Koreksi Untuk Kelas XII Akuntansi Di SMKN 1 Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, *5*(2), 1–8.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Permendagri Republik Nomor 70*, *Nomor 65*(879), 2004–2006.

Romadhon, F. A., & Nawawi, Z. M. (2024). Economic Reviews Journal. *Economic Reviews Journal*, *3*(1), 96–108. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.468

Syahputra, D. (2017). Pengaruh Kemandirian Belajar dan Bimbingan Belajar Terhadap Kemampuan Memahami Jurnal Penyesuaian pada Siswa SMA Melati Perbaungan. *At-Tawassuth*, *2*(2), 368–388.

Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, *1*(1), 64. https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947

Callista, E. T., Puspitasari, A. H., Tasyakurina, N. B., Wulandari, N. D., & Akbar, F. S. (2024). Analisis Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan Krian Sidoarjo, (4).

Iqbal, M. M., Handayani, S., & Safitri, D. I. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, *3*(2), 173. https://doi.org/10.33474/jisop.v3i2.11192

Lazuardi, A., & Pawestri, H. P. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, *13*(3), 582–595.

Mauliddiyah, N. L. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk, *21*(April), 6.

Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2025). Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat, *7*, 193–208.